

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang : 2015 – 2016

Masa Sidang : 1 : Ke -Rapat

Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2015

Sifat : Terbuka

: 19.30 WIB s.d 23.30 WIB Pukul

Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),

Gedung Nusantara DPR RI

: Penjelasan pokok-pokok Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Acara

Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016.

Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

Hadir Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI : Menteri Perhubungan beserta jajaran. Hadir Mitra

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. **PENDAHULUAN**

- 1. Rapat dibuka pada pukul 19.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah penjelasan pokok-pokok Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016...
- 3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
- 4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.	Unit Eselon I/Program	Pagu Kebutuhan	Pagu Hasil Penajaman RAPBN TA 2016	Kekurangan
1.	Sekretariat Jenderal (Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan)	976.680.000	887.221.672	89.458.328
2.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan)	105.330.000	100.311.699	5.018.301
3.	Ditjen Perhubungan Darat (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Darat)	10.879.139.000	3.979.159.961	6.899.979.039
4.	Ditjen Perhubungan Laut (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Laut)	28.577.655.000	15.030.268.535	13.547.386.465
5.	Ditjen Perhubungan Udara (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Udara)	18.376.111.000	10.742.420.052	7.633.690.948
6.	Ditjen Perkeretaapian (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perkeretaapian)	39.558.846.000	13.632.786.598	25.926.059.402
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan (Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan)	240.359.000	228.259.100	12.099.900
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan)	6.712.099.000	5.559.932.165	1.152.166.835
	TOTAL	105.426.219.000	50.160.359.782	55.265.859.218

- 2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar program masing-masing unit organisasi dilaksanakan pada daerah provinsi/kabupaten/kota yang sangat membutuhkan serta disesuaikan dengan masukan dari Komisi V DPR RI mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada provinsi/kabupaten/kota tertentu.
- 3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 pada unit Eselon I dalam Rapat Dengar Pendapat mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.30 WIB.

Jakarta, 14 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

KETUA RAPAT,

TTD

TTD

IGNASIUS JONAN

FARY DJEMY FRANCIS